

Inovasi Basis Data Kewilayahan dalam Pengelolaan Informasi Wilayah di Kota Surabaya

Rafif Aqilah Wahyudi¹, Diana Hertati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
E-mail: 23041010207@student.upnjatim.ac.id¹, diana.adne2025@gmail.com²

Article History:

Received: 28 Februari 2026

Revised: 10 Maret 2026

Accepted: 23 Maret 2026

Keywords: Difusi Inovasi, Basis Data Kewilayahan, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah, Surabaya

Abstract: Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan data kewilayahan. Kota Surabaya mengembangkan inovasi basis data kewilayahan berbasis aplikasi yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAPEMKESRA) atas arahan langsung Wali Kota Surabaya. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi sebelumnya, di mana perangkat daerah harus datang langsung ke Pemerintah Kota Surabaya untuk memperoleh informasi kewilayahan dan data kewilayahan yang belum terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi basis data kewilayahan tersebut menggunakan teori difusi inovasi Rogers. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data yang digunakan merupakan data primer yaitu wawancara dengan staf Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta observasi dan data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi basis data kewilayahan memberikan kemudahan akses informasi, meningkatkan efisiensi kerja perangkat daerah, serta memperkuat koordinasi antarinstansi. Berdasarkan atribut inovasi Rogers, inovasi ini memiliki keunggulan relatif, kompatibilitas tinggi, tingkat kompleksitas rendah, dapat diuji coba, dan hasilnya mudah diamati.

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor publik telah menjadi fokus utama dalam perubahan birokrasi di Indonesia, seiring dengan semakin tinggi keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang cepat, jelas, dan bertanggung jawab. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi membuat pemerintah daerah perlu memperbarui cara kerja birokrasi yang sebelumnya tradisional menjadi sistem pemerintahan yang menggunakan elektronik (*e-government*). Pelaksanaan *e-government* tidak hanya dipandang sebagai penggunaan teknologi saja, tetapi juga sebagai langkah terencana untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempererat kerja sama antar lembaga, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada data.

Dalam konteks pemerintahan daerah, salah satu aspek fundamental yang membutuhkan

dukungan teknologi informasi adalah pengelolaan data kewilayahan. Data kewilayahan meliputi informasi batas wilayah administratif, peta wilayah, data spasial, serta atribut kewilayahan lainnya yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penataan ruang, penyelenggaraan pelayanan publik, dan penyelesaian potensi konflik batas wilayah. Kejelasan dan ketersediaan data kewilayahan yang akurat sangat menentukan tertib administrasi pemerintahan daerah serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan antarwilayah.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan data kewilayahan di banyak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Data seringkali tersebar di berbagai perangkat daerah, tidak terintegrasi, serta dikelola dengan sistem yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan akses informasi, duplikasi data, serta rendahnya efisiensi birokrasi. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan data pemerintahan yang belum terintegrasi menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pemerintahan berbasis elektronik (Rachmawati et al., 2024).

Di Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, kebutuhan akan data kewilayahan yang akurat dan mudah diakses menjadi semakin penting seiring dengan dinamika pembangunan dan kompleksitas wilayah administrasi. Kota Surabaya terdiri atas berbagai kecamatan dan kelurahan yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan data kewilayahan yang mampu mendukung koordinasi lintas perangkat daerah serta memastikan keseragaman data yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Sebelum dikembangkannya inovasi basis data kewilayahan, perangkat daerah di Kota Surabaya yang membutuhkan informasi terkait batas wilayah dan data kewilayahan harus datang secara langsung ke Pemerintah Kota Surabaya, khususnya ke Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAPEMKESRA). Proses tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme permohonan manual, koordinasi administratif, serta verifikasi dokumen yang memerlukan waktu dan sumber daya. Kondisi ini dinilai kurang efisien dan tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang cepat dan responsif.

Situasi tersebut mendorong perlunya terobosan inovatif dalam pengelolaan data kewilayahan. Menyadari pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan daerah, Wali Kota Surabaya menginstruksikan pengembangan inovasi basis data kewilayahan berbasis aplikasi melalui Perwali Nomor 116 Tahun 2024 tentang Daftar Inovasi Daerah. Inovasi ini kemudian dikembangkan dan dikelola oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAPEMKESRA) Kota Surabaya sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum, termasuk penataan dan penegasan batas wilayah administratif.

Aplikasi basis data kewilayahan dirancang sebagai sistem informasi terintegrasi yang menyediakan data batas wilayah, peta administratif, serta informasi kewilayahan lainnya yang dapat diakses secara daring oleh seluruh perangkat daerah. Melalui aplikasi ini, perangkat daerah tidak lagi diwajibkan untuk datang langsung ke Pemerintah Kota Surabaya guna memperoleh data kewilayahan. Akses data dapat dilakukan secara mandiri, cepat, dan real time, sehingga mendukung efisiensi kerja serta memperkuat koordinasi antarinstansi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh wali kota Surabaya pada seminar *Innovative Government Award (IGA)*, dalam seminar tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan betapa krusialnya ide satu peta satu data sebagai dasar utama dalam pembuatan keputusan. Dengan menggunakan sistem ini, Pemkot Surabaya dapat menggambarkan keadaan kependudukan hingga tingkat Rukun Warga (RW) dengan sangat detail (Irman, 2025).

Pengembangan inovasi basis data kewilayahan di Kota Surabaya sejalan dengan kebijakan nasional tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan ini menyoroti betapa pentingnya menggabungkan data dan sistem informasi dalam pelaksanaan pemerintahan agar dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. Dalam kerangka ini, inovasi basis data kewilayahan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kebijakan SPBE di tingkat pemerintah daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inovasi sistem informasi pemerintahan daerah mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pelayanan publik. Susanti dalam (Susanti, 2022) menemukan bahwa pemanfaatan sistem basis data di Pemerintah Kota Surabaya berkontribusi positif terhadap penerapan prinsip good governance. Penelitian lain mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di berbagai daerah seperti Kabupaten Donggala dan Kota Bekasi juga menunjukkan bahwa digitalisasi data pemerintahan mampu mempercepat proses administrasi, meskipun masih menghadapi tantangan integrasi dan kesiapan sumber daya manusia (Dewi, Iffansyah, & Muhammad, 2023; Mariana & Pandoyo, 2024)

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik membahas inovasi basis data kewilayahan dengan pendekatan teori inovasi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademis dalam kajian inovasi sektor publik, khususnya dalam konteks pengelolaan data kewilayahan di pemerintah daerah.

Penelitian ini mengaplikasikan teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Everett M. Rogers sebagai dasar analisis. Teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengadopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh beberapa sifat dari inovasi itu sendiri, seperti keunggulan relatif, komparabilitas, kompleksitas, peluang untuk dicoba, dan kemudahan untuk diamati (Raztiani & Mashur, 2022). Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana inovasi basis data kewilayahan di Kota Surabaya dikembangkan, diterapkan, dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah.

Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan keuntungan baik segi teori maupun praktik. Dari sudut pandang teori, studi ini diinginkan dapat memperluas pemahaman tentang inovasi dalam pemerintahan daerah yang menggunakan teknologi informasi. Sedangkan dari segi praktik, studi ini diharapkan dapat menjadi sumber penilaian dan acuan bagi pemerintah daerah lainnya dalam menciptakan cara yang efisien dan berkelanjutan dalam inovasi pengelolaan data kewilayahan .

LANDASAN TEORI

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik adalah upaya pembaruan atau terobosan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk menciptakan cara, metode, proses, atau produk pelayanan yang lebih efektif, efisien, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan praktik sebelumnya. Secara umum, inovasi pelayanan publik tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi dapat berupa pengembangan, penyempurnaan, atau adaptasi dari sistem pelayanan yang sudah ada agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Peraturan Menteri PANRB No. 91 Tahun 2021 menyatakan bahwa inovasi dalam layanan publik merupakan sebuah langkah baru dalam jenis layanan yang berasal dari ide-ide kreatif yang asli dan/atau perubahan dan penyesuaian yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers

Teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menganalisis proses adopsi inovasi, baik di sektor privat maupun sektor publik. Rogers menjelaskan bahwa inovasi adalah ide, praktik, atau benda yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok lain yang mengadopsinya. Penyebaran inovasi

.....

dipahami sebagai cara di mana suatu inovasi disampaikan melalui saluran tertentu, dalam waktu tertentu, di antara anggota dari suatu sistem sosial. (Raztiani & Mashur, 2022).

Menurut Rogers, keberhasilan suatu inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana inovasi tersebut diterima, dipahami, dan dimanfaatkan oleh penggunanya. Oleh karena itu, Rogers mengemukakan lima atribut utama inovasi yang memengaruhi tingkat adopsi, yaitu keunggulan relatif (*relative advantage*), kompatibilitas (*compatibility*), kompleksitas (*complexity*), kemungkinan dicoba (*trialability*), dan *observability*.

Keunggulan relatif mengacu pada seberapa jauh suatu inovasi dianggap lebih unggul dibandingkan dengan konsep atau metode yang ada sebelumnya. Inovasi yang mampu memberikan manfaat nyata, seperti efisiensi waktu, penghematan biaya, atau peningkatan kinerja, cenderung lebih cepat diadopsi. Dalam konteks pemerintahan daerah, keunggulan relatif sering diukur dari kemampuan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kerja aparatur.

Kompatibilitas berhubungan dengan seberapa baik keselarasan inovasi dengan nilai, pengalaman, dan keperluan orang yang menggunakan. Inovasi yang selaras dengan kebijakan organisasi, budaya kerja birokrasi, dan kebutuhan perangkat daerah akan lebih mudah diterima. Sebaliknya, inovasi yang bertentangan dengan kebiasaan kerja atau regulasi yang berlaku cenderung mengalami resistensi.

Kompleksitas menggambarkan seberapa besar inovasi dilihat sebagai sesuatu yang sukar untuk dimengerti dan diaplikasikan. Inovasi yang terlalu rumit akan menghambat proses adopsi, terutama di lingkungan birokrasi yang memiliki latar belakang kemampuan teknologi yang beragam. Oleh karena itu, inovasi di sektor publik idealnya dirancang dengan sistem yang sederhana, user friendly, dan mudah dioperasikan.

Trialability mengacu pada seberapa besar suatu inovasi bisa diuji sebelum diimplementasikan sepenuhnya. Kesempatan untuk melakukan uji coba memungkinkan pengguna memahami manfaat inovasi serta mengurangi risiko kegagalan. Sementara itu, *observability* berkaitan dengan sejauh mana hasil atau dampak inovasi dapat diamati secara langsung oleh pengguna maupun pihak lain. Dampak inovasi yang mudah diamati akan mempercepat proses difusi dalam sistem sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yang deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang proses inovasi, pelaksanaan, dan penggunaan basis data wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, terutama di bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAPEMKESRA). Menurut Creswell dan Poth metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam pengembangan dan penggunaan inovasi (Priyadi, 2005).

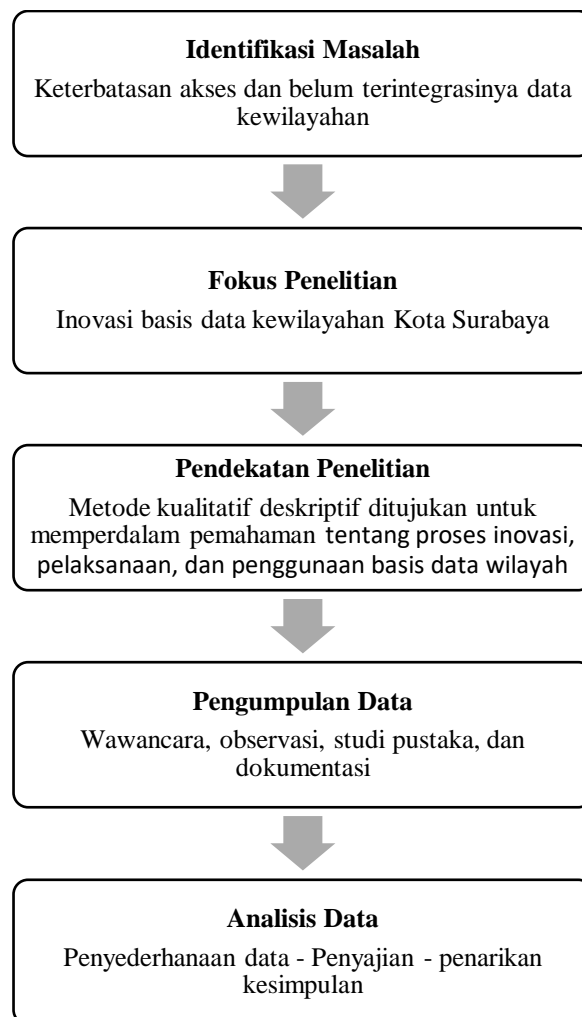
Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surabaya, dengan fokus utama pada Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAPEMKESRA) sebagai unit kerja yang menginisiasi dan mengelola aplikasi basis data kewilayahan. Fokus penelitian diarahkan pada proses inovasi basis data kewilayahan, perubahan mekanisme akses data sebelum dan sesudah inovasi, serta pemanfaatan aplikasi oleh perangkat daerah.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara yang dilakukan dengan staf Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkhususnya sub koordinator Administrasi Kewilayahan sebagai bagian yang bertanggung jawab atas urusan perwilayahan di Kota Surabaya, serta observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung penggunaan aplikasi basis data kewilayahan, termasuk alur akses data dan fitur yang tersedia.

.....

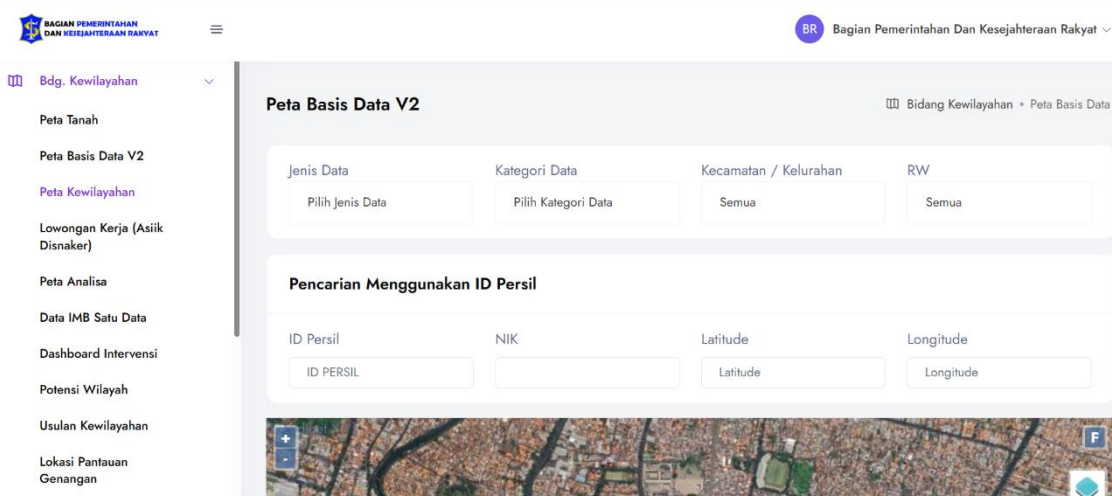
Data sekunder diambil melalui penelitian literatur dan dokumentasi yang berasal dari buku teks ilmiah, artikel jurnal nasional yang diakui, hasil riset sebelumnya, serta regulasi yang terkait dengan inovasi dalam pelayanan publik, sistem pemerintahan yang menggunakan elektronik, dan pengelolaan data wilayah.

Metode pengolahan data yang diterapkan dalam studi ini merujuk pada kerangka kerja yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama, yaitu penyederhanaan data, penyajian data, dan pengambilan keputusan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Pada tahap reduksi data, dilakukan pemilahan dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun berdasarkan tema penelitian. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian secara sistematis.



Gambar 1. Diagram Alur Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Basis Data Kewilayahan

Gambaran Umum Inovasi Basis Data Kewilayahan

Inovasi basis data kewilayahan yang dikembangkan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAPEMKESRA) Kota Surabaya merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan berbagai data kewilayahan secara komprehensif. Aplikasi ini tidak hanya memuat data batas wilayah administratif, tetapi juga mengintegrasikan berbagai informasi strategis yang sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, inovasi ini berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal bagi data kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam implementasinya, aplikasi basis data kewilayahan menyediakan informasi batas kecamatan dan kelurahan yang dilengkapi dengan peta digital, sehingga memudahkan perangkat daerah dalam memahami cakupan wilayah administrasi secara spasial. Kejelasan batas wilayah ini penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, penataan ruang, serta mencegah potensi sengketa batas wilayah antarwilayah administratif.

Integrasi Data Kewilayahan dan Sektoral

Salah satu keunggulan utama inovasi basis data kewilayahan di Kota Surabaya adalah kemampuannya mengintegrasikan data kewilayahan dengan berbagai data sektoral. Aplikasi ini memuat informasi mengenai jumlah dan persebaran aset Pemerintah Kota Surabaya, yang menjadi dasar penting dalam pengelolaan barang milik daerah serta perencanaan pemanfaatan aset. Selain itu, tersedia pula data mengenai potensi wilayah, yang mencakup potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masing-masing kecamatan dan kelurahan.

Aplikasi ini juga memfasilitasi usulan kewilayahan dari perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait, sehingga proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih partisipatif dan berbasis data. Integrasi data lokasi pantauan genangan air menjadi fitur penting dalam mendukung mitigasi bencana dan penanganan banjir, khususnya pada wilayah-wilayah rawan genangan di Kota Surabaya.

Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Selain data kewilayahan dan aset, aplikasi basis data kewilayahan juga mengintegrasikan data pelayanan publik lintas sektor. Salah satunya adalah data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terintegrasi dengan peta kewilayahan dan informasi bangunan eksisting. Integrasi ini memudahkan perangkat daerah dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang serta

memastikan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah.

Aplikasi ini juga memuat peta kewilayahan yang berisi informasi jumlah reklame terbatas dengan luasan di atas 8 m², yang sangat berguna bagi pengawasan reklame dan optimalisasi pendapatan daerah. Data detail bangunan eksisting, rumah padat karya (RPK), jumlah persil terdata, serta jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) terdata turut memperkaya basis data kewilayahan dan mendukung akurasi administrasi pertanahan dan perpajakan daerah.

Integrasi Data Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Inovasi basis data kewilayahan di Kota Surabaya tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan fisik wilayah, tetapi juga mengakomodasi data sosial dan kesejahteraan masyarakat. Aplikasi ini memuat data penerima beasiswa dan honor keagamaan, yang mendukung transparansi dan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Selain itu, terdapat data rekapitulasi kartu keluarga terhadap bangunan, yang berguna dalam perencanaan layanan dasar dan pemetaan kependudukan.

Lebih lanjut, aplikasi ini juga menyajikan data sosial kependudukan yang penting, seperti jumlah ibu hamil, balita, kasus stunting, data penyakit, jumlah anak sekolah, serta usia sekolah. Integrasi data tersebut memungkinkan perangkat daerah untuk melakukan pemetaan permasalahan sosial secara spasial dan merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi basis data kewilayahan memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Inovasi Berdasarkan Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers

Analisis inovasi basis data kewilayahan di Kota Surabaya dalam studi ini memakai teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers sebagai dasar analitis utama. Teori ini menyoroti bahwa seberapa cepat suatu inovasi diterima akan sangat dipengaruhi oleh pandangan pengguna terhadap sifat-sifat dari inovasi tersebut.

Dari aspek keunggulan relatif (*relative advantage*), inovasi basis data kewilayahan menunjukkan manfaat yang signifikan dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Sebelum adanya aplikasi ini, perangkat daerah harus datang langsung ke Pemerintah Kota Surabaya untuk memperoleh data kewilayahan, yang membutuhkan waktu, biaya, dan proses administratif yang tidak sederhana. Dengan hadirnya aplikasi basis data kewilayahan, seluruh informasi dapat diakses secara daring, cepat, dan terintegrasi. Keunggulan ini dirasakan secara langsung oleh perangkat daerah dalam bentuk peningkatan efisiensi kerja, percepatan pengambilan keputusan, serta kemudahan koordinasi lintas instansi.

Dari sisi kompatibilitas (*compatibility*), inovasi ini dinilai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan pemerintah daerah. Aplikasi basis data kewilayahan sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendukung agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, inovasi ini kompatibel dengan tugas dan fungsi BAPEMKESRA sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan umum dan kewilayahan, sehingga tidak menimbulkan pertentangan dengan struktur birokrasi yang ada.

Aspek kompleksitas (*complexity*) juga menjadi faktor penting dalam adopsi inovasi. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi basis data kewilayahan dirancang dengan antarmuka yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Penyajian data dalam bentuk peta digital dan dashboard informatif membantu pengguna memahami informasi kewilayahan tanpa memerlukan kemampuan teknis yang tinggi. Tingkat kompleksitas yang rendah ini mendorong penerimaan inovasi oleh berbagai perangkat daerah dengan latar belakang kemampuan teknologi yang beragam.

Selanjutnya, dari perspektif kemungkinan dicoba (*trialability*), inovasi basis data

kewilayahan memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk diuji coba secara bertahap. Perangkat daerah dapat mencoba memanfaatkan fitur-fitur tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa harus langsung menggunakan seluruh fungsi aplikasi. Proses uji coba ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru serta memberikan umpan balik bagi pengelola aplikasi untuk melakukan penyempurnaan.

Sementara itu, aspek *observability* terlihat dari dampak inovasi yang mudah diamati dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan pola kerja dari sistem manual menjadi berbasis aplikasi digital dapat dirasakan secara langsung, baik dalam hal kecepatan akses data, ketepatan informasi, maupun peningkatan kualitas koordinasi antarperangkat daerah. Dampak positif tersebut mempercepat proses difusi inovasi karena mendorong perangkat daerah lain untuk ikut memanfaatkan aplikasi basis data kewilayahan.

KESIMPULAN

Inovasi basis data kewilayahan yang dikembangkan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAPEMKESRA) Kota Surabaya atas arahan langsung Wali Kota Surabaya merupakan bentuk nyata transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas permasalahan birokrasi sebelumnya, di mana perangkat daerah harus datang langsung ke Pemerintah Kota Surabaya untuk memperoleh informasi kewilayahan, yang berdampak pada rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja. Keberadaan aplikasi basis data kewilayahan terbukti mampu meningkatkan kemudahan akses, kecepatan, serta akurasi informasi bagi perangkat daerah. Integrasi berbagai jenis data, mulai dari batas kecamatan dan kelurahan, aset pemerintah kota, potensi wilayah, usulan kewilayahan, pantauan genangan, data perizinan bangunan, reklame, hingga data sosial dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan aplikasi ini sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.

Ditinjau dari perspektif teori difusi inovasi Rogers, inovasi basis data kewilayahan di Kota Surabaya memenuhi seluruh atribut inovasi yang mendorong adopsi. Inovasi ini memiliki keunggulan relatif yang jelas dibandingkan sistem sebelumnya, kompatibel dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan SPBE, memiliki tingkat kompleksitas yang rendah, dapat diuji coba secara bertahap, serta menghasilkan dampak yang mudah diamati. Karakteristik tersebut menjelaskan mengapa inovasi ini dapat diterima dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah secara luas. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi basis data kewilayahan di Kota Surabaya berkontribusi positif terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta efektivitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, inovasi ini berpotensi untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah lain, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara kuantitatif dampak inovasi ini terhadap kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaat inovasi dapat diukur secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, N., Iffansyah, I., & Muhammad, Z. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 887–894.
- Irman, T. (2025). Wali Kota Eri Bagikan Best Practice Satu Data Kewilayahan di IGA 2025.
-

- Retrieved December 30, 2025, from Karya Nyata website:
<https://karyanyata.com/2025/12/10/wali-kota-eri-bagikan-best-practice-satu-data-kewilayahan-di-iga-2025/>
- Mariana, L., & Pandoyo, P. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi. *Reformasi Administrasi*, 11(2), 123–130. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.4136>
- Priyadi, B. P. (2005). Pendekatan Kualitatif. “*Dialogue*” *JIAKP*, 854.
- Qomaruddin, & Sa’diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: الإلحرتاز عن اخلطإ يف القياس واخلطاء يكون من جهتنى اللوىل من جهة املادة وهى ام: اةق داص قى ضدقب قد ساف قى ضق سد ب تلت نأب ف ند علما قى دنا زم امأو لاق جات نلإ قحص زم ب جاول اةق داص قى ضدقب قد ساف قى ضق سد ب تلت نأب ف ند علما قى دنا. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rachmawati, R., Ghiffari, R. A., Wijdani, A. F., Qonita, M., Tania, N., & Pigawati, B. (2024). Optimizing GISTARU: Evaluating a GIS-Based Platform’s Contribution to Indonesian Spatial Planning for Smart City Development. *Geoplanning*, 11(1), 57–70. <https://doi.org/10.14710/geoplanning.11.1.57-70>
- Raztiani, R., & Mashur, D. (2022). Inovasi Pelayanan Pada Kepolisian Sektor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.30596/japk.v2i1.10270>
- Susanti, A. (2022). Implementation of the Principles of Good Governance in Improving Public Services. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(12), 63–72.
-